



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 1853/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Kontribusi Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam
Proses Demokratisasi Libya Pasca Pemerintahan
Muammar Gaddafi**

Skripsi

Oleh

Natanael Estrada

6092001311

BANDUNG

2024



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 1853/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Kontribusi Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam
Proses Demokratisasi Libya Pasca Pemerintahan
Muammar Gaddafi

Skripsi

Oleh

Natanael Estrada

6092001311

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

BANDUNG

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Natanael Estrada
Nomor Pokok : 6092001311
Judul : Kontribusi Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam Proses Demokratisasi Libya Pasca Pemerintahan Muammar Gaddafi

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 30 Januari 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Anggota
Mangadar Situmorang, M.Si., Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

: 

Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Natanael Estrada
Nomor Pokok Mahasiswa : 6092001311
Program Studi : Hubungan Internasional
Pembimbing : Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si. (19920201) Pembimbing Tunggal
Hari dan Tanggal Ujian Skripsi : Senin tanggal 30 Januari 2024
Judul (Bahasa Indonesia) : Kontribusi Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam Proses Demokratisasi Libya Pasca Pemerintahan Muammar Gaddafi
Judul (Bahasa Inggris) : The Contribution of Economic, Social and Cultural Factors in the Libyan Democratization Process Post Muammar Gaddafi's Government

1. Perbaikan Judul Skripsi (**Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/title case**)

Judul (Bahasa Indonesia) → **#N/A**

Judul (Bahasa Inggris) → **#N/A**

2. Perbaikan Umum (meliputi: cara merujuk, daftar pustaka, teknis *editing*):

- a. Ubah bahasa di *footnote* dan di daftar pustaka menggunakan Bahasa Indonesia.
- b. Tambahkan referensi yang lebih modern dalam skripsi ini (2010 ke atas).

3. Perbaikan di Bab I:

- a. Perjelas kajian Hubungan Internasional dalam penelitian ini dengan mengaitkannya dengan "International Affairs".

4. Perbaikan di Bab II:

- a. Jelaskan lebih rinci terkait kondisi konflik demokrasi di Libya antara pihak-pihak yang berkonflik.

5. Perbaikan di Bab III:

- a. Alih-alih demokrasi tidak berkembang di Libya, demokrasi justru masih dalam proses jadi jangan campur aduk di dalam analisis.
- b. Tunjukkan lebih banyak pada proses demokratisasi dibandingkan pada keadaan ideal demokrasi itu sendiri.
- c. Kesimpulannya sendiri seharusnya faktor-faktor tersebut masih dalam proses untuk memenuhi kriteria ideal.

6. Perbaikan di Bab IV:

- a. Kesimpulannya sendiri seharusnya terdiri dari faktor-faktor yang masih berproses untuk memenuhi kriteria ideal dari demokrasi liberal.

7. Perbaikan di Bab V: **#N/A**

DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI

Bandung, 30 Januari 2024

Ketua Program Studi,

kaprodi_hi.fisip@unpar.ac.id

30/1/2024 10:35:23

Angguntari Ceria Sari, Ph.D.

Penguji,

adri@unpar.ac.id

30/1/2024 9:43:58

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Penguji (Pembimbing),

nyoman@unpar.ac.id

30/1/2024 9:45:15

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Penguji,

mangadar@unpar.ac.id

30/1/2024 9:44:03

Mangadar Situmorang, Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Natanael Estrada
NPM : 6092001311
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Kontribusi Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam Proses Demokratisasi Libya Pasca Pemerintahan Muammar Gaddafi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Januari 2024



Handwritten signature of Natanael Estrada.

Natanael Estrada

ABSTRAK

Nama : Natanael Estrada

NPM : 6092001311

Judul : Kontribusi Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam Proses Demokratisasi Libya Pasca Pemerintahan Muammar Gaddafi

Transisi pemerintahan suatu negara menjadi demokratis menjadi tantangan yang muncul di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara pasca terjadinya Arab Spring. Negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Irak, dan Iran telah berhasil melakukan transisi pemerintahan yang demokratis. Faktanya hingga saat ini, Libya masih mengalami hambatan dalam melakukan transisi pemerintahan setelah jatuhnya Muammar Gaddafi. Penelitian ini mendalami pengaruh faktor ekonomi, sosial, dan budaya dalam konteks demokratisasi Libya pasca pemerintahan Muammar Gaddafi. Dengan pertanyaan penelitian, "Bagaimana faktor ekonomi, sosial, dan budaya berkontribusi dalam proses demokratisasi di Libya?" penelitian ini mengeksplorasi dinamika kompleks yang melibatkan perubahan politik dan masyarakat setelah era Gaddafi. Faktor ekonomi diteliti untuk memahami dampaknya terhadap stabilitas ekonomi negara dan bagaimana hal tersebut memengaruhi proses demokratisasi. Analisis faktor sosial menyoroti peran masyarakat dalam partisipasi politik, sementara faktor budaya diteliti untuk memahami norma-norma politik yang membentuk landasan demokrasi. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas interaksi antara ekonomi, sosial, dan budaya dalam membentuk arah demokratisasi di Libya pasca Gaddafi. Penelitian ini juga melihat bagaimana elemen ekonomi, sosial, dan budaya berinteraksi untuk mendemokratisasi Libya pasca jatuhnya pemerintahan Muammar Gaddafi.

Kata Kunci: Libya, Demokratisasi, Faktor Ekonomi, Faktor Sosial, Faktor Budaya, dan Transisi Pemerintahan

ABSTRACT

Name : Natanael Estrada

NPM : 6092001311

Title : The Contribution of Economic, Social and Cultural Factors in the Libyan Democratization Process Post Muammar Gaddafi's Government

The transition of a country's government towards democracy is a challenge that emerged in Middle Eastern and North African countries following the Arab Spring. Countries such as Tunisia, Egypt, Iraq, and Iran have successfully implemented democratic government transitions. In fact to date, Libya is still experiencing obstacles in carrying out a government transition after the fall of Muammar Gaddafi. This research explores the influence of economic, social and cultural factors in the context of Libya's democratization after the reign of Muammar Gaddafi. With the research question, "How do economic, social, and cultural factors contribute to the democratization process in Libya?" This research explores the complex dynamics involving political and societal change after the Gaddafi era. Economic factors are researched to understand their impact on the country's economic stability and how they influence the democratization process. Social factor analysis highlights the role of society in political participation, while cultural factors are examined to understand the political norms that form the basis of democracy. With an interdisciplinary approach, this research aims to provide in-depth insight into the complexity of interactions between economic, social and cultural aspects in shaping the direction of democratization in post-Gaddafi Libya. This research also looks at how economic, social and cultural elements interact to democratize Libya after the fall of Muammar Gaddafi's government.

Keywords: Libya, Democratization, Economic Factors, Social Factors, Cultural Factors, and Government Transition

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kontribusi Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam Proses Demokratisasi Libya Pasca Pemerintahan Muammar Gaddafi” dengan lancar dan tepat waktu. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini bertujuan agar para pembaca dapat mendapatkan pemahaman mengenai kontribusi faktor ekonomi, sosial, dan budaya dalam proses demokratisasi Libya yang berlangsung dari runtuhnya rezim Gaddafi hingga saat ini. Penulis menggunakan teori demokrasi dari Robert Dahl dan Arief Budiman, didukung oleh teori ekonomi Adam Smith, teori pluralisme Robert Dahl, dan konsep budaya politik oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba untuk menjelaskan fenomena dan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini membawa kebaruan dari segi analisis faktor spesifik yang berkontribusi terhadap demokratisasi Libya setelah pemerintahan Gaddafi, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman mengenai faktor ekonomi, sosial, dan budaya dalam konteks proses demokratisasi di Libya pasca pemerintahan Muammar Gaddafi. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga penelitian ini dapat membuka pintu wawasan dan memotivasi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

Bandung, 3 Januari 2024



Natanael Estrada

UCAPAN TERIMA KASIH

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." - Filipi 4:6

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, yang selalu memberikan tuntunan dan rancangan terbaik untuk penulis dalam setiap langkah penulisan skripsi dan kehidupan penulis selama di Bandung hingga saat ini.
2. Bapak **Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.** selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Kedua orang tua penulis, **Carby Simanjuntak dan Christina Siagian**, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.
4. Pendamping penulis dari kecil hingga saat ini, **Mbak Kokom**, terima kasih atas doa dan nasehat yang diberikan sepanjang hidup penulis.
5. **Divisi PSDM dan Wakil Bidang 3 HMPSHI 2023**, Wahyu Prastama, Aureishia Huang, Khansa Athaya, Trixie Vania, Zahra Aulia, dan Chakaranca Baginda serta Keisha Aurel yang telah menemani dan memberikan warna pada hidup penulis selama berdinamika di dalam HMPSHI dan HI UNPAR.
6. Teman penulis, **Stiven Kang**, yang telah bersedia memberikan arahan dan dukungan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Terkhusus, **6092001124**, yang setia menemani, menyemangati, dan memberikan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR SINGKATAN | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 4 |
| 1.2.1 Deskripsi Masalah | 4 |
| 1.2.2 Pembatasan Masalah..... | 9 |
| 1.2.3 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian | 10 |
| 1.4 Kajian Literatur | 10 |
| 1.5 Kerangka Pemikiran | 13 |
| 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data | 19 |
| 1.6.1 Metode Penelitian | 19 |
| 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data..... | 20 |
| 1.7 Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA LIBYA PADA MASA TRANSISI PEMERINTAHAN PASCA GADDAFI | 22 |
| 2.1 Perkembangan Ekonomi Libya dalam Masa Transisi Pemerintahan Libya..... | 23 |
| 2.1.1 Transisi Sistem Perekonomian Libya Menuju Kapitalisme dan Ekonomi Pasar..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.2 Pengaruh Intervensi Asing Terhadap Kondisi Perekonomian Libya | 29 |
| 2.2 Kondisi Sosial dalam Masa Transisi Pemerintahan Libya..... | 34 |
| 2.2.1 Kombinasi Kekuatan Sosial dalam Pembentukan Tatanan Politik Libya | 35 |
| 2.2.2 Peranan Masyarakat Libya dalam Mendorong Kesetaraan Politik | 38 |
| 2.3 Kondisi Kebudayaan dalam Proses Demokratisasi Libya | 41 |
| 2.3.1 Perwujudan Budaya Sipil dalam Dinamika Politik Masyarakat Libya | 41 |
| 2.3.2 Peranan Jamahiriya Sebagai Warisan Pembentuk Budaya Politik Libya Pasca Gaddafi | 45 |
| BAB III KONTRIBUSI FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM PROSES DEMOKRATISASI LIBYA..... | 50 |
| 3.1 Kontribusi Faktor Ekonomi dalam Proses Demokratisasi Libya | 51 |
| 3.2 Kontribusi Faktor Sosial dalam Proses Demokratisasi Libya | 63 |
| 3.3 Kontribusi Faktor Budaya dalam Proses Demokratisasi Libya..... | 69 |
| BAB IV KESIMPULAN | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1: Foreign Direct Investment (FDI) Libya pada Tahun 2003-2020 | 24 |
| Gambar 2.2: Persentase Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Libya yang Dihasilkan Oleh Industri Minyak dan Gas pada Tahun 2012 - 2021..... | 25 |
| Gambar 2.3: Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Libya pada Tahun 2010 - 2022 | 28 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1: Tiga Pilar dari Doktrin <i>Responsibility to Protect</i> | 30 |
| Tabel 2.2: Sanksi dan Embargo Ekonomi Uni Eropa Terhadap Libya..... | 33 |
| Tabel 3.1: Perkembangan HDI di Libya Pada Tahun 2011-2021 | 52 |
| Tabel 3.2: Perbandingan Kontribusi Sektor Perekonomian Terhadap PDB Libya pada Tahun 2011 dan 2014 (dalam persentase)..... | 57 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|---|
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| R2P | : Responsibility to Protect |
| GNA | : General National Accord |
| PBB | : Persatuan Bangsa-Bangsa |
| ISIL | : Islamic State in Libya |
| UKM | : Usaha Kecil dan Menengah |
| FDI | : Foreign Direct Investment |
| PDB | : Pendapatan Domestik Bruto |
| ADB | : African Development Bank |
| NATO | : North American Treaty Organization |
| AS | : Amerika Serikat |
| UEA | : Uni Emirat Arab |
| PEMILU | : Pemilihan Umum |
| HDI | : Human Development Index |
| UNSMIL | : United Nations Support Mission in Libya |
| GNU | : Government of National Unity |
| LNA | : Libyan National Army |
| MDGs | : Millennium Development Goals |
| MIGAS | : Minyak dan Gas |
| PFM | : Public Financial Management |
| LPDF | : Libyan Political Dialog Forum |
| PNB | : Produk Nasional Bruto |
| LAAF | : Libyan Arab Armed Forces |
| ISA | : Internal Security Agency |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permulaan Arab Spring pada tahun 2010 hingga tahun 2012 memicu rantai perubahan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dimulai di Tunisia, gerakan protes anti-pemerintah untuk memberantas korupsi dan mengembalikan demokrasi kemudian menyebar ke negara-negara tetangga di Kawasan Afrika Utara. Ketidakpuasan publik dengan pemerintahan yang otoriter, tertutup, dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi kekuatan pendorong di balik munculnya Arab Spring.¹ Libya yang saat itu berada di bawah pimpinan Muammar Gaddafi, adalah salah satu negara yang terkena dampak dari Arab Spring. Pada tanggal 15 Februari 2011, protes anti-pemerintah dimulai di Libya untuk menggulingkan rezim otoriter Muammar Gaddafi yang telah berkuasa selama 42 tahun. Gerakan tersebut pertama kali dimulai dengan protes tanpa kekerasan di Benghazi pada Februari 2011 yang menyerukan reformasi politik dan ekonomi.² Namun, rezim Gaddafi bereaksi keras terhadap protes tersebut dengan menahan dan membunuh sejumlah demonstran. Tindakan keras dari pemerintahan Gaddafi tersebut memicu amarah masyarakat Libya, alhasil menyebabkan gerakan protes besar di seluruh Libya.³

¹ Ufiem Maurice Ogonnaya, "Arab Spring in Tunisia, Egypt and Libya: A Comparative Analysis of Causes and Determinants," *Alternatives: Turkish Journal of International Relations* 12, no. 3 (2013): 4–16.

² Safa Elnaili, "Female Protagonist in Libyan Short Story Post the Arab Spring: A Critical Discourse Analysis," *International Journal of Language & Linguistics* 5, no. 2 (2018): 1–16.

³ Arturo Varvelli, "Libya: From Uprising to War, 2011–2019," *Bustan: The Middle East Book Review* 11, no. 1 (2020): 34–45.

Pemberontakan masyarakat Libya terhadap rezim Muammar Gaddafi adalah salah satu aspek dari Arab Spring yang memengaruhi tatanan politik Libya. Respon yang keras dari pemerintahan Gaddafi mendorong tindakan dari dunia Barat, terutama Amerika Serikat di bawah panji Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973.⁴ *Responsibility to Protect* (R2P) yang menekankan kewajiban masyarakat internasional untuk melindungi masyarakat dari kejahatan massal, digunakan untuk membenarkan tindakan Prancis dan Inggris dalam konflik Libya pada tahun 2011 terutama dengan menegakkan blokade laut dan zona larangan terbang (*no-fly zone*) atau dengan menawarkan dukungan logistik militer.⁵ Alhasil pada bulan Oktober 2011, pemerintahan Gaddafi berhasil digulingkan. Tidak lama setelah jatuhnya Gaddafi, alih-alih berkembang menjadi negara demokratis, Libya jatuh ke dalam gejala politik yang lebih parah.

Jatuhnya rezim Gaddafi diharapkan menjadi jalan menuju restrukturisasi sosial, politik, dan ekonomi negara Libya. Akan tetapi akibat adanya kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*), proliferasi senjata, dan persaingan antara faksi politik lokal memperburuk krisis keamanan Libya. Faksi politik Libya terbagi dalam tiga kelompok besar yang terdiri atas General National Accord (GNA) atau pemerintahan Tripoli yang didukung oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), pasukan milisi Marsekal Khalifa Haftar atau pemerintahan Tobruk, dan Suku Tuareg yang bergabung dalam gerakan milisi Islamic State in Libya (ISIL) atau

⁴ Mediel Hove, "Post-Gaddafi Libya and the African Union: Challenges and the Road to Sustainable Peace," *Journal of Asian and African Studies* 52, no. 3 (2015): 271–286.

⁵ Nicholas Idris Eramah, "Cosmopolitanism, Responsibility to Protect and the Libya Intervention: A Reassessment," *India Quarterly: A Journal of International Affairs* 74, no. 4 (2018): 383–401.

pemerintahan Sirte.⁶ Dalam masa transisi pemerintahan Libya, tidak ada pemerintahan stabil yang dapat mengambil alih kekuasaan sehingga terjadi kekosongan kekuasaan yang mengakibatkan konflik internal antara faksi-faksi politik yang bersaing. Kekosongan kekuasaan juga dijadikan momentum bagi faksi-faksi politik untuk meraih kekuasaan dengan tujuan utama untuk menguasai sumber daya yang dimiliki Libya terutama minyak dan gas, yang dapat menentukan kebijakan politik Libya.⁷

Uni Eropa juga sangat terlibat dalam pergolakan di Libya, terutama dalam hal imigrasi ilegal, keamanan perbatasan, ekonomi, dan signifikansi geopolitik. Libya dan Uni Eropa merupakan mitra strategis yang bergerak dalam sejumlah bidang kebijakan penting, seperti manajemen imigrasi, kerja sama militer, dan kerja sama energi. Akan tetapi krisis keamanan Libya menjadi tantangan tersendiri bagi Uni Eropa untuk mewujudkan tindakan terkoordinasi dengan Libya. Sejak awal munculnya krisis keamanan Libya, stabilisasi politik Libya dan pengembangan kemitraan dengan pemerintah Libya telah menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa.⁸

⁶ Felix Shihundu, "Libya: Arms Proliferation and Armed Groups. The Libyan Conflict Revisited," *Conflict Studies Quarterly*, no. 38 (2022): 60–72.

⁷ Kamal Eljayash, "Documentation of Environmental Disclosure Practices in the Oil Companies in the Countries of the Arab Spring – Some Evidences from Egypt, Libya and Tunisia," *Journal of Economics, Business and Management* 3, no. 10 (2015): 954–958.

⁸ Joanna Modrzejewska-Leśniewska, "The Need for Dialogue between the European Union and the Arab League," *The Review of European Affairs* 4, no. 1 (2020): 63–76.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Proses demokratisasi Libya merupakan peristiwa yang memiliki dampak signifikan dalam kerangka hubungan internasional. Pasca-revolusi tahun 2011 yang menggulingkan rezim otoriter Muammar Gaddafi, Libya memasuki fase transisi yang rumit menuju demokrasi. Namun, perjalanan ini diwarnai oleh ketidakstabilan politik, perseteruan antar kelompok, dan perang saudara yang berkepanjangan. Dalam konteks hubungan internasional, upaya demokratisasi Libya memperlihatkan peran aktor luar, baik negara-negara tetangga regional maupun kekuatan global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa. Intervensi militer oleh negara-negara Barat pada awal revolusi dan berbagai upaya mediasi internasional menandai campur tangan eksternal dalam proses politik Libya.⁹

Selain itu, sumber daya alam Libya, terutama minyak, menjadi faktor penting dalam menarik perhatian aktor-aktor internasional yang berkompetisi untuk mendapatkan akses dan pengaruh di negara tersebut. Meskipun demikian, berbagai tantangan internal seperti fragmentasi politik, ekonomi yang rapuh, dan kehadiran kelompok-kelompok bersenjata membuat proses demokratisasi menjadi rentan terhadap gangguan domestik dan intervensi asing. Oleh karena itu, perjalanan Libya menuju demokrasi tidak hanya menjadi masalah internal, tetapi juga menjadi fokus perhatian dan intervensi dari aktor-aktor internasional yang tertarik pada stabilitas

⁹ Andrew Cheatham, "Libya Can Move Past Its Political Deadlock, but It Will Take Work to Maintain a 'Deal,'" *United States Institute of Peace*, 2023, <https://www.usip.org/publications/2023/05/libya-can-move-past-its-political-deadlock-it-will-take-work-maintain-deal>.

dan pengaruh di kawasan tersebut.¹⁰ Proses demokratisasi di Libya berkaitan erat dengan *international affairs*, terutama terkait dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial budaya antarnegara. Komunitas internasional telah terlibat dalam mendukung transisi Libya menuju demokrasi, termasuk PBB, yang telah mengumumkan rencana untuk mendukung Libya menuju pemilu nasional yang demokratis. Bank Dunia juga menekankan pentingnya mencapai kesepakatan politik yang berkelanjutan mengenai masa depan Libya sebagai salah satu langkah penting menuju pembangunan ekonomi dan sosial.¹¹ Namun, prosesnya berjalan lambat dan ditandai dengan kegagalan institusional, politik sektarian, dan budaya impunitas, dengan negara yang masih berada dalam kebuntuan politik dan pusat-pusat kekuasaan yang bersaing untuk mendapatkan legitimasi. Keterlibatan negara-negara asing, khususnya negara-negara Eropa, Amerika, dan Timur Tengah, juga menjadi hambatan bagi Libya menuju demokrasi, karena kehadiran mereka secara tidak langsung bertujuan untuk membantu transformasi Libya, namun kepentingan mereka mungkin tidak sejalan dengan kepentingan rakyat Libya.¹²

Sistem politik dan ekonomi dari negara-negara di Afrika Utara, terutama Libya, Mesir, dan Tunisia, secara signifikan telah dipengaruhi oleh Arab Spring. Tingkat kebebasan politik, peluang ekonomi, dan keadilan sosial yang lebih tinggi dituntut selama masa pemberontakan Arab Spring di ketiga negara tersebut. Kekuasaan pemerintah otoriter yang sudah lama berkuasa berhasil digulingkan di

¹⁰ Maneesha Gopalan, "Libya's Unstable Road to Democracy," *Australian Institute of International Affairs*, 2017, <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/libya-unstable-road-democracy/>.

¹¹ "The World Bank in Libya," *World Bank*, 2023, <https://www.worldbank.org/en/country/libya/overview>.

¹² Gopalan, "Libya's Unstable Road to Democracy."

Tunisia dan Mesir sehingga mewujudkan pemerintahan yang demokratis.¹³ Transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratis seringkali diwarnai oleh pemberontakan dan perlawanan dari masyarakat, akan tetapi Tunisia dan Mesir membuktikan bahwa perubahan politik dapat dilakukan melalui gerakan massa, yaitu Arab Spring.¹⁴

Presiden Zine El Abidine Ben Ali digulingkan sebagai akibat dari revolusi 2011, yang berhasil mengubah tatanan politik Tunisia secara signifikan. Keluhan ekonomi, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi, dan korupsi, serta keinginan untuk kebebasan politik dan demokrasi, merupakan kekuatan utama di balik revolusi di Tunisia.¹⁵ Efek revolusi pada struktur pemerintahan Tunisia berdampak besar pada pertumbuhan politik, hukum, dan ekonomi Tunisia. Setelah pemberontakan, Tunisia mengalami periode perubahan politik yang mencakup pembuatan konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.¹⁶

Sama halnya dengan Tunisia, Mesir turut mendapatkan dampak positif dari Arab Spring dalam hal transformasi politik dan kemajuan demokrasi. Presiden Hosni Mubarak digulingkan dalam revolusi 2011, yang berdampak besar pada struktur politik dan hukum Mesir, serta pertumbuhan ekonomi negara.¹⁷ Kemajuan demokrasi di Mesir dibantu oleh Arab Spring terutama dalam hal demografi

¹³ Andrey V. Korotayev et al., "The Arab Spring: A Quantitative Analysis," *Arab Studies Quarterly* 36, no. 2 (2014): 149.

¹⁴ Korotayev et al., "The Arab Spring", 156-157.

¹⁵ Kenneth Perkins, *A History of Modern Tunisia*, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2014), 216–240, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139162227>.

¹⁶ Ibrahim Fraihat, *Unfinished Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring* (New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2016), 58–64.

¹⁷ Nizar Becheikh, "Political Stability and Economic Growth in Developing Economies: Lessons from Morocco, Tunisia and Egypt Ten Years after the Arab Spring," *Insights into Regional Development* 3, no. 2 (2021): 229–251.

penduduk Mesir, terkait dengan demografis usia muda, yang berdampak signifikan pada pergeseran politik dan revolusi demokrasi. Munculnya Arab Spring, mewujudkan pemerintahan demokratis bagi Mesir melalui pembentukan konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.¹⁸

Libya telah menghadapi beberapa tantangan dalam transisi demokratisnya, yang melibatkan unsur-unsur dari bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Berbagai masalah rumit, termasuk sebagai disintegrasi sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidakstabilan politik, telah menghambat proses demokratisasi Libya. Kurangnya kesepakatan dan kekuasaan yang bertentangan menjadi ciri lingkungan politik Libya. Hal tersebut menciptakan kebuntuan dan mempertanyakan validitas lembaga dan kepemimpinan pemerintah. Keadaan politik yang tidak menentu turut memberikan kontribusi besar pada disintegrasi sosial, kemerosotan ekonomi, dan krisis legitimasi.¹⁹

Kemerosotan ekonomi yang luas telah dihasilkan dari kerapuhan pemerintahan; PDB per kapita turun 50% antara 2011 dan 2019 dibandingkan dengan pertumbuhan 68% jika ekonomi berlanjut pada proyeksi pra-konfliknya. Ekspor minyak Libya dikurangi secara drastis oleh konflik yang sedang berlangsung, yang memiliki efek pada pasokan minyak dunia. Kepemimpinan, ideologi, hubungan luar negeri, dan peristiwa politik dan ekonomi domestik semuanya memiliki efek besar pada transisi demokratis suatu negara. Legitimasi otoriterisme melalui reformasi demokrasi neoliberal, yang mendukung modernisasi

¹⁸ Dan LaGrafte, "The Youth Bulge in Egypt: An Intersection of Demographics, Security, and the Arab Spring," *Journal of Strategic Security* 5, no. 2 (June 2012): 65–80.

¹⁹ Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, "Patterns of Libya's Instability in the Aftermath of the Collapse of Gaddafi's Regime," *Politeja* 13, no. 42 (2016): 229–232.

dan sistem liberal ekonomi pasar bebas, memperumit transisi dari otoritarianisme ke demokrasi.²⁰

Ketegangan interkomunal menyebabkan ketegangan di tatanan sosial Libya, sementara konflik lokal dan organisasi ekstremis bersenjata turut menambah ketidakstabilan di Libya. Bahasa dan agama adalah dua elemen budaya yang memiliki pengaruh besar pada pandangan dan perilaku orang di negara-negara Arab, termasuk Libya. Kebutuhan akan demokrasi politik dan ekonomi untuk tumbuh menjadi lebih radikal, memengaruhi perjuangan untuk demokrasi yang berpotensi menyatukan kebudayaan yang berbeda. Selain itu, pertempuran untuk demokrasi adalah upaya yang kompleks yang mencakup pertarungan kelas, kepentingan ekonomi, dan oposisi terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan.²¹

Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan, penulis melihat anomali bahwa faktanya, transisi pemerintahan menuju demokratisasi memiliki hambatan yang berat bagi Libya, yang terbukti dengan tidak terbentuknya pemerintahan berdaulat selama delapan tahun. Keberhasilan transisi pemerintahan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang dipicu oleh Arab Spring tidak terealisasikan di Libya. Penulis juga berpendapat bahwa Libya harus mempertimbangan faktor ekonomi, sosial, dan budaya sebagai faktor pendorong terwujudnya demokrasi di negara tersebut.

²⁰ Waniss A Otman dan Erling Karlberg, *The Libyan Economy: Economic Diversification and International Repositioning* (Berlin; London: Springer, 2007), 281–351.

²¹ Szczepankiewicz-Rudzka, “Patterns of Libya’s Instability” 237-239.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam Proses Demokratisasi Libya Pasca Pemerintahan Muammar Gaddafi,” penulis membatasi permasalahan penelitian pada periode pasca-pemerintahan Muammar Gaddafi, dengan tujuan untuk mendalami dan memahami peran krusial dari ketiga faktor tersebut dalam membentuk dinamika politik dan masyarakat Libya. Analisis akan menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi negara, faktor sosial yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat, dan faktor budaya yang membentuk norma-norma politik di Libya. Interaksi antara ketiga faktor tersebut diharapkan dapat mewujudkan kebebasan berpendapat, penentuan nasib sendiri (*self-determination*), pengembangan sumber daya manusia, kesetaraan politik, dan kesejahteraan rakyat, sebagai indikator keberhasilan demokrasi

1.2.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, muncul sebuah pertanyaan penelitian mengenai, **“Bagaimana faktor ekonomi, sosial, dan budaya berkontribusi dalam proses demokratisasi di Libya?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi faktor ekonomi, budaya, dan sosial yang dihadapi Libya dalam mewujudkan transisi ke

pemerintahan yang demokratis. Untuk memberikan jawaban yang lebih komprehensif, penelitian ini akan didukung oleh Teori Demokrasi menurut kajian Robert Alan Dahl dan Arief budiman.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan untuk meraih gelar sarjana dalam Hubungan internasional bagi peneliti. Penelitian ini juga berguna untuk menguji pemahaman penulis mengenai hubungan antara faktor ekonomi, sosial, dan budaya dalam proses demokratisasi di Libya. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai bahan referensi untuk pengembangan teori demokrasi, khususnya dalam analisis faktor ekonomi, sosial, dan budaya dalam konteks negara-negara yang sedang mengalami proses transisi politik.

1.4 Kajian Literatur

Salah satu hambatan Libya dalam demokratisasi adalah peran intervensi eksternal dan dampaknya terhadap transisi Libya. Intervensi oleh kekuatan Barat di Libya dipandang sebagai peluang untuk membentuk tatanan baru, tetapi pada akhirnya upaya yang dilakukan oleh dunia Barat gagal memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintahan Libya (Baldaro & Costantini, 2020). Intervensi didorong oleh masalah keamanan, seperti kontrol migrasi dan perang melawan terorisme, dibandingkan komitmen terhadap nilai-nilai liberal. Pendekatan terfragmentasi oleh kekuatan Eropa yang mengejar visi stabilitas berbeda di Libya yang berkontribusi pada kegagalan transisi (Baldaro & Costantini, 2020).²²

²² Edoardo Baldaro dan Irene Costantini, "Fragility and Resilience in the European Union's Security Strategy: Comparing Policy Paradigms," *Italian Political Science Review* 51, no. 3 (2020): 1–16.

Abdelsalam Mohamed Elhudairi and Hüseyin Işıksal dalam “The Role of ISIS as a Religious Terrorist Group in the Instability of Libya in the Post-Gaddafi Era: The Case of Sirte” menyatakan bahwa perubahan dari masyarakat otoriter ke masyarakat demokratis adalah proses yang sulit. Transformasi penuh dari sistem otoriter ke demokrasi melibatkan proses yang panjang dan sulit. Perkembangan politik dan ekonomi yang lebih luas tidak mungkin terjadi tanpa lingkungan yang aman. Dengan demikian, penyelesaian perang saudara di Libya merupakan syarat utama untuk mengakhiri ketidakamanan dan ketidakstabilan di Libya.²³

Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kegagalan transisi pemerintahan Libya juga penting untuk dianalisis. Pentingnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sektor pariwisata dan peran mereka dalam mengembangkan industri pariwisata nasional telah diteliti oleh Alammari et al., (2016). Tantangan ekonomi yang dihadapi Libya, termasuk alokasi sumber daya dan pengelolaan sumber daya, berdampak signifikan pada proses transisi. Dampak ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata pada transisi Libya telah menjadi fokus utama kegagalan transisi pemerintahan.²⁴ Konflik bersenjata yang berkelanjutan dan fragmentasi politik yang mengikuti runtuhnya rezim Gaddafi telah menghambat pembentukan tatanan politik baru (Mundy, 2021). Kegagalan untuk mencapai tatanan hegemonik baru

²³ Abdelsalam Elhudairi dan Hüseyin Işıksal, “Analysis of Libya’s Insecurity: The Examination of Violence in Five Libyan Cities,” *International Journal of Social Sciences and Management* 10, no. 2 (2023): 36–46.

²⁴ Ali Alammari, Ashour Abdussalam Khalif, dan Ghazala Othman, “The Importance of SMEs in Libyan Tourism Sector,” *Agroinform* (2016): 45–58.

telah memperpanjang peralihan pemerintahan dan mencegah konsolidasi pemerintahan yang stabil.²⁵

Peran hukum dan rancangan konstitusional dalam mengakhiri impunitas dan mendorong stabilitas dalam masyarakat pascakonflik juga telah dikaji dalam konteks Libya (Schwartz, 2019). Pilihan desain konstitusional dan praktik terbaik yang disebarluaskan oleh organisasi pemerintah dan internasional untuk resolusi konflik dan pembangunan negara belum berhasil mencapai stabilitas yang berkelanjutan di Libya.²⁶ Tantangan pluralisme hukum semakin memperumit proses transisi (Brysk, 2018).²⁷ Dampak kegagalan transisi pemerintahan Libya terhadap dinamika regional dan migrasi juga telah dipelajari. Peran media dalam membentuk opini publik dan persepsi tentang migrasi antara Eropa dan Afrika Utara telah dianalisis (Sakr, 2012). Penggambaran media tentang migrasi dan politik berita telah memengaruhi sikap publik dan respons kebijakan.²⁸

Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian dalam hal pemahaman faktor-faktor spesifik yang berkontribusi pada tantangan yang dihadapi dalam membangun pemerintahan demokratis yang diukur melalui tiga faktor utama dalam mewujudkan demokrasi yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara literatur menyoroti faktor-faktor seperti intervensi eksternal, faktor sosial ekonomi, ketidakstabilan politik, konflik

²⁵ Jacob Mundy, "Libya: Lost in Transition," *Middle East Law and Governance* 13, no. 1 (2021): 1–3.

²⁶ Alex Schwartz, "International Judges on Constitutional Courts: Cautionary Evidence from Post-Conflict Bosnia," *Law & Social Inquiry* 44, no. 1 (2019): 1–30.

²⁷ Alison Brysk, *Ending Impunity: Law and Its Limits* (New York: Oxford University Press, 2018), 193–221, <https://doi.org/10.1093/oso/9780190901516.003.0008>.

²⁸ Naomi Sakr, "Media, Migration and Public Opinion: Myths, Prejudices and the Challenge of Attaining Mutual Understanding between Europe and North Africa," *Mediterranean Politics* 17, no. 2 (2012): 259–260.

bersenjata, dan desain konstitusional, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam interaksi dan dinamika faktor-faktor tersebut dan dampaknya terhadap proses transisi pemerintahan dan demokratisasi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan Teori Demokrasi menurut kajian Robert Alan Dahl dan Arief budiman. Demokrasi menjadi subjek penelitian yang terus berubah seiring waktu. Akan tetapi dasar utama dari sistem pemerintahan demokratis adalah kedaulatan rakyat.²⁹ Demokrasi pada dasarnya memiliki satu prinsip yang sama untuk semua jenis pemerintahan, yaitu seluruh lapisan masyarakat harus diperlakukan secara adil melalui partisipasi politik yang akan memengaruhi pengambilan keputusan kolektif suatu pemerintahan. Perwujudan demokrasi pada hakikatnya harus menempatkan masyarakat sebagai entitas politik yang setara dengan para pemangku kepentingan (*politically equal*).³⁰

Meskipun perwujudan demokrasi yang stabil telah diterapkan di berbagai negara dalam jangka waktu yang panjang, demokrasi tetap menghadapi hambatan yang dikenal sebagai krisis legitimasi pemerintahan. Jika mengacu pada keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga demokrasi, maka istilah “legitimasi” merujuk pada persepsi publik bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi pemerintah dan institusi demokrasi juga akan terancam jika kepercayaan

²⁹ Arief Budiman, *Teori Negara*, 2nd ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 39.

³⁰ Robert A Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), 37.

publik tidak dihargai.³¹ Krisis legitimasi pemerintahan terdiri dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut mencakup kurangnya kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah dalam menghadapi permasalahan esensial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, dan lain-lain.³²

Permasalahan terkait implementasi demokrasi dapat terjadi dalam masa transisi pemerintahan (proses demokratisasi). Untuk memastikan bahwa demokrasi terwujud dalam suatu negara dan pemerintahan, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pemerintahan dan rakyat yang demokratis. Pertama, seluruh lapisan masyarakat dewasa yang mempunyai hak untuk memilih, termasuk wanita, harus terlibat dalam pembentukan kebijakan nasional negara dan diberikan kebebasan untuk berpendapat. Apabila suatu kebijakan akan diterapkan oleh pemerintah, maka rakyat harus memiliki hak untuk memilih, mengkritik, dan menolak kebijakan tersebut. Kedua, kebebasan berpendapat masyarakat harus bersifat transparan dan harus dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan negara. Apabila ada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan ditentang oleh rakyat, maka pemerintah harus membuat kebijakan alternatif yang bersifat inklusif.³³

Perlu dipahami bahwa untuk mewujudkan demokrasi, diperlukan beberapa faktor yang dapat mendukung perwujudan demokrasi di suatu negara. Faktor-faktor tersebut dibagi dalam tiga indikator, yaitu:

1. Faktor ekonomi

³¹ Jürgen Habermas, *Legitimation Crisis*, terj. Thomas McCarthy (Cambridge: Polity, 1976), 9.

³² Budiman, *Teori Negara*, 40.

³³ Dahl, *On Democracy*, 37-38.

Menurut kajian Adam Smith, Perekonomian pasar adalah lingkungan yang sangat menguntungkan bagi lembaga-lembaga demokrasi karena ekonomi pasar adalah perekonomian yang didominasi oleh sektor swasta dan tidak diatur oleh pemerintah yang diharapkan dapat memberikan dinamika ekonomi yang lebih beragam.³⁴ Perkembangan ekonomi pasar di suatu negara akan sejalan dengan perkembangan sistem politik yang demokratis. Smith mengatakan bahwa pemerintah harus mengurangi andilnya dalam perekonomian negara. Smith turut berpendapat bahwa pemerintah harus fokus pada penyediaan pertahanan nasional, penegakan keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.³⁵ Smith juga turut menekankan pentingnya persaingan yang memaksimalkan kesejahteraan sosial. Dalam masyarakat demokratis, persaingan menimbulkan keyakinan bahwa pasar dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan.³⁶

2. Faktor sosial

Robert Dahl menyatakan bahwa faktor sosial adalah interaksi dan kombinasi dari berbagai kekuatan sosial dalam masyarakat seperti masyarakat miskin, menengah, menengah-ke atas, serta pemerintah,

³⁴ Adam Smith, *The Wealth of Nations* (United Kingdom: Harriman House Limited, 2010), 316–320.

³⁵ Smith, *The Wealth of Nations*, 344-347.

³⁶ Smith, *The Wealth of Nations*, 570-574.

sehingga membentuk tatanan politik yang kuat.³⁷ Robert Dahl juga menekankan pentingnya kehadiran organisasi independen yang dapat mendistribusikan kekuasaan di seluruh lapisan masyarakat. Menurut Dahl organisasi-organisasi seperti perusahaan komersial, organisasi nirlaba, dan partai politik, memberikan peluang bagi masyarakat yang independen dari pemerintah dan menawarkan ruang bagi suara dan gagasan oposisi, perbedaan pendapat, dan minoritas.³⁸ Teori pluralisme dan demokratisasi Dahl terletak pada penekanannya dalam distribusi kekuasaan dan kebebasan berserikat. Pluralisme berkontribusi pada demokratisasi dengan memberikan jalan bagi partisipasi dan keterwakilan politik masyarakat di luar pemerintahan. Masyarakat yang menganggap kesetaraan politik dan demokrasi sebagai tujuan utama akan terbentuk oleh budaya politik demokratis. Perbedaan dan perselisihan politik di antara warga negara harus diterima dan dijaga. Pemerintah yang dipilih harus mempunyai wewenang penuh atas militer, polisi, dan lembaga-lembaga demokrasi yang mendasar.³⁹

3. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan berhubungan dengan kenyataan konkrit yang terjadi di dalam masyarakat, terkait dengan kepercayaan dan nilai-nilai yang dipegang oleh sebuah komunitas masyarakat. Budaya diidentifikasi melalui variasi bahasa, agama, ras, etnis, geografi, dan

³⁷ Robert A Dahl, *A Preface to Democratic Theory*, 50th Anniversary Edition. (Chicago: The University of Chicago Press, 2006), 67–71.

³⁸ Dahl, *A Preface to Democratic Theory*, 71-73.

³⁹ Dahl, *A Preface to Democratic Theory*, 84-87.

ideologi.⁴⁰ Gabriel Almond dan Sidney Verba berpendapat bahwa perwujudan demokrasi yang stabil tercermin dalam masyarakat yang menerapkan budaya sipil (*civic culture*). Almond dan Verba berpendapat bahwa budaya sipil ditandai dengan penerimaan terhadap sistem politik, patriotisme terhadap bangsa, harapan akan perlakuan adil dari pemerintah, dan karakteristik yang menunjukkan persatuan budaya.⁴¹ Budaya politik terbagi dalam 3 kategori yang mencakup partisipan, subjek, dan parokial. Budaya politik partisipan berarti masyarakat percaya bahwa mereka dapat berkontribusi dan terkena dampak oleh sistem pemerintahan. Maka dari itu, masyarakat sadar dan terlibat secara sukarela dalam proses politik suatu negara. Dalam budaya politik subjek, masyarakat melihat dirinya sebagai subjek pemerintah dan bukan partisipan dalam proses politik negara. Masyarakat hanya mematuhi pemerintah tetapi hanya sedikit berpartisipasi dan kesadaran politik mereka terbatas. Sedangkan dalam budaya politik parokial, masyarakat hanya sedikit menyadari kehadiran pemerintah dan tidak memiliki pengetahuan maupun ketertarikan terhadap politik. Masyarakat parokial hanya berfokus pada komunitas lokal dan permasalahan yang ada dalam komunitas tersebut.⁴² Almond dan Verba berargumentasi bahwa demokrasi stabil muncul dalam masyarakat yang merupakan campuran dari ketiga jenis budaya politik.

⁴⁰ Budiman, *Teori Negara*, 47-53.

⁴¹ Gabriel A Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), 8–10.

⁴² Almond dan Verba, *The Civic Culture*, 22-29.

Dalam budaya sipil yang ideal, warga negara cukup aktif dalam politik untuk mengekspresikan pendapat mereka kepada pemerintah namun tidak terlalu aktif sehingga mereka menjadi idealis atau bahkan apatis. Keseimbangan dalam politik budaya diharapkan dapat menyelesaikan ketegangan dalam demokrasi antara kontrol rakyat dan pemerintahan yang efektif.⁴³

Selain tiga faktor yang telah dipaparkan, terdapat dua faktor yang dapat menentukan arah demokratisasi negara, yaitu:

1. Intervensi asing

Ketika suatu negara melakukan intervensi karena adanya perbedaan pandangan terhadap demokrasi, kecil kemungkinan bagi lembaga-lembaga demokrasi di negara tersebut untuk berkembang karena sedang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. Dalam kasus-kasus tertentu, keadaan ini cukup untuk menjelaskan mengapa lembaga-lembaga demokrasi tidak berkembang atau bertahan di suatu negara ketika keadaan-keadaan lain jauh lebih menguntungkan.⁴⁴

2. Kontrol atas kekuasaan penegak hukum

Ancaman internal yang paling serius terhadap demokrasi, dibandingkan ancaman eksternal berupa intervensi asing, berasal dari pihak berwenang yang mampu menggunakan dua bentuk paksaan fisik berupa militer dan polisi. Jika para pemangku kepentingan yang dipilih secara demokratis tidak mempunyai kewenangan penuh atas angkatan

⁴³ Almond dan Verba, *The Civic Culture*, 22-29.

⁴⁴ Dahl, *On Democracy*, 147-148.

bersenjata dan penegak hukum, maka institusi politik demokratis tidak dapat muncul atau bertahan karena memungkinkan untuk terjadinya pemberontakan (kudeta).⁴⁵

Berbeda dengan negara yang sudah menganut sistem demokrasi, tantangan demokratisasi dalam transisi pemerintahan mencakup bagaimana demokrasi bisa diimplementasikan dalam sistem pemerintahan yang baru.⁴⁶ Hasil dari proses demokratisasi yang diharapkan melalui faktor ekonomi, sosial, dan budaya dibagi dalam 5 indikator utama, yaitu kebebasan berpendapat, penentuan nasib sendiri (*self-determination*), pengembangan sumber daya manusia, kesetaraan politik, dan kesejahteraan rakyat. Perwujudan dari lima indikator kesuksesan demokrasi menjadi hal penting apabila mempertimbangkan hak masyarakat untuk menjadi entitas politik yang setara dengan para pemangku kepentingan (*politically equal*).⁴⁷

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam mengkaji dan meneliti mengenai proses demokratisasi Libya, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan difokuskan untuk menemukan faktor-faktor pendukung proses demokratisasi Libya. Metode penelitian yang lebih mengandalkan kata-kata daripada angka dikenal sebagai metode penelitian kualitatif, karena hubungan erat antara penelitian kualitatif dan ilmu utama yang diteliti dalam penelitian ini.⁴⁸ Adapun penulis juga menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi sendiri dapat

⁴⁵ Dahl, *On Democracy*, 148-149.

⁴⁶ Dahl, *On Democracy*, 2.

⁴⁷ Dahl, *On Democracy*, 44-45.

⁴⁸ Alan Bryman, *Social Research Methods*, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2016), 380.

dipahami sebagai pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan perbandingan dan pengecekan terhadap satu data dengan data yang lainnya. Peneliti akan melakukan teknik triangulasi terhadap sumber data yang akan dikumpulkan baik jurnal, buku, maupun sumber lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini.⁴⁹

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan dan analisis kualitatif terhadap teks dan dokumen yang ditemukan akan menjadi metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.⁵⁰ Dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif ini, penulis akan menggunakan dua cara yang dipetakan oleh Creswell, yaitu *qualitative documents* dan *qualitative audiovisual and digital materials*. Dalam melakukan metode *qualitative documents*, peneliti akan menggunakan dokumen publik seperti berita dan laporan resmi, dan menggunakan dokumen pribadi seperti jurnal, surat, dan sebagainya. Metode *qualitative audiovisual and digital materials* merupakan pengumpulan data yang terdiri dari materi materi audio visual dan digital kualitatif termasuk materi atau substansi media sosial.⁵¹ Maka dari itu, peneliti juga akan mengumpulkan data melalui pesan teks media sosial, *website*, dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian peneliti mengenai peran faktor ekonomi, sosial, dan budaya dalam Masa Transisi Pemerintahan Demokratis Libya.

⁴⁹ John W Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2018), 190.

⁵⁰ Bryman, *Social Research Methods*, 544-554.

⁵¹ Creswell dan Cresswell, *Research Design*, 191-193.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dimuat secara sistematis dengan membagi penelitian kedalam empat (IV) bab, sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah **pendahuluan** dari penelitian ini yang terdiri dari **latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.**

Bab II (“**Kondisi Libya Melalui Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pada Masa Transisi Pemerintahan Pasca Gaddafi**”) membahas mengenai kondisi pemerintahan libya setelah jatuhnya Muammar Gaddafi. Bab ini terdiri dari “**Perkembangan Ekonomi Libya dalam Masa Transisi Pemerintahan Libya**”, “**Kondisi Sosial dalam Masa Transisi Pemerintahan Libya**”, dan “**Kondisi Kebudayaan dalam Proses Demokratisasi Libya**”.

Bab III (“**Kontribusi Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam Demokratisasi Libya**”) membahas mengenai faktor yang memengaruhi proses demokratisasi di Libya. Bab ini terdiri dari “**Kontribusi Ekonomi dalam Proses Demokratisasi Libya**”, “**Kontribusi Sosial dalam Proses Demokratisasi Libya**”, dan “**Kontribusi Budaya dalam Proses Demokratisasi Libya**”

Bab IV berisi **kesimpulan** dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan sehingga mampu untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.